

Daftar Pustaka

- Ali Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggaer Sigit pramukti dan fuadi primaharsa, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2015. Hlm. 62
- Anggar Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2015. Hlm. 25.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 236
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indaonesia, Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit
- Pahala, Marihot Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rosady ruslan. *Aspek aspek hukum dan Etika dalam aktievitas public relation*. Kehumasan. Jakarta. Hlm.86.

- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Ikhtisar Anatomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali,
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandi, Erly. 2005. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sumarsan Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Bogor.
- Sri yuda Pudyatmoko. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Yuswanto, 2010. *Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak daerah Retribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah*, Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan.
- Sutedi, Adrian. 2010. *"Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Unang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai sewa Reklame.

Eko Jumartono, “Wawancara Pribadi”, Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, 25 januari 2020, Kantor BPPKAD, Kudus.

Djati Sholichah, “Wawancara langsung”, kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Kudus, 25 Januari 2020, Kantor SATPOL PP, Kudus

Purnama Julian Z, “Wawancara langsung”, kepala Promotor Khusus Kabupaten Kudus, Penanggung Jawab Pajak Reklame PT. DJARUM, Kudus.